

**Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD DIY Pada Pelaksanaan Tindak  
Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah DIY Tahun  
Anggaran 2013 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

**Oleh:**

Silvia Aquina Tarigan<sup>\*</sup>, Sa'ida Rusdiana<sup>\*\*</sup>

**INTISARI**

Pemerintahan yang baik akan tercapai dengan adanya kerjasama antara unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan juga masyarakat. Semua unsur penyelenggara pemerintahan harus saling mengawasi satu sama lain terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang sifatnya transparan dan harus jelas pencatatannya. Pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan dengan jujur dan dapat di pertanggung jawabkan. Laporan keuangan akan diperiksa oleh BPK untuk dilihat kebenarannya kemudian ditindak lanjuti oleh DPRD.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk memberikan pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa mengenai dunia kerja untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, serta mengajak mahasiswa untuk mencoba menyelesaikan berbagai isu yang ada di masyarakat. Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai sistem, fungsi, dan tugas setiap bagian yang ada dan cara pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Salah satu fungsi pengawasan DPRD DIY yaitu pada pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah DIY oleh BPK RI. DPRD akan memberikan tanggapan atas laporan tersebut baik berupa saran dan juga dapat meminta keterangan dari BPK atau klarifikasi dari pemerintah daerah. Selanjutnya DPRD merekomendasikan Laporan tersebut kepada Gubernur DIY untuk ditindak lanjuti.

**Kata kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, BPK RI**

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

<sup>\*\*</sup> Dosen Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**Implementation of Oversight Function in DIY Parliament On Practice of  
Follow Up the Results of DIY Government Auditing Fiscal Year 2013 By**

**BPK RI**

By:

Silvia Aquina Tarigan<sup>\*</sup>, Sa'ida Rusdiana<sup>\*\*</sup>

***ABSTRACT***

Good governance will be achieved with the cooperation between the elements of government and community organizers. All elements of the government administration need to monitor each other, especially in terms of financial management that are transparent and should be completed clearly. The local government need to make a fairness and accountable financial report. Financial reports will be examined by the BPK to see the truth then followed up by Parliament.

Implementation of the Job Training aims to provide experience and insight to students about the world of work to be a professional workforce, and to encourage students to try to resolve the various issues that exist in society. Job training in the Office of Legislative Secretariat can increase student knowledge about the systems, functions, and duties of each section and how local governments solve the problems that exist in society.

One of the function of Oversight in Parliament is to follow up the audit report of DIY government's financial statements by BPK. Parliament will give a response to the report in the form of advice and also can request information from the BPK or get clarification from the local government. The next parliament will recommend the report to the Governor of Yogyakarta to be followed up.

**Keywords: Oversight Function, Parliament, BPK**

---

<sup>\*</sup> Students of Diploma 3 of Law, Vocational School Gadjah Mada University

<sup>\*\*</sup> Lecture of Civil Law Section, Faculty of Law Gadjah Mada University